UNIVERSITAS
GADJAH MADA
KEBIJAKAN KRIMINALISASI PENGABAIAN PERINTAH TERTULIS OTORITAS JASA KEUANGAN
Megawaty Putri Limaria, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.

----------. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2011.

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Mamuji, Sri, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.

Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

----------. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang tentang Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Translated by Kurt Wilk. New York: Greenwood Press, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. ke-3. Jakarta: UI Press, 1986.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.

---------. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Sumardjono, Maria. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.

Surajiyo. *Dasar-Dasar Logika*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Syarif, Amiroedin. *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
KEBIJAKAN KRIMINALISASI PENGABAIAN PERINTAH TERTULIS OTORITAS JASA KEUANGAN
Megawaty Putri Limaria, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Zuraida, Ida. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Artikel Jurnal

Fatoni, Syamsul. "Pembaruan Hukum Pidana Melalui Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Berorientasikan Pendekatan Religius," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (Juli 2015).

Luthan, Salman. "Asas dan Kriteria Kriminalisasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 1 (Januari 2009)

Masyhud, Ahmad. dkk, "Tinjauan Yuridis Mengenai Praktik Sanksi Perintah Tertulis Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan". 2023. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2): 77-90. https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i2.712.

Septrina, Theresia. 2024. "Kajian Hukum Pemberian Perintah Tertulis Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan". *UNES Law Review* 6 (3), 8380-93. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1747.

Syafri, Muhammad Irvan, d.k.k. "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Hukum Perbankan di Era Digital" *Media Hukum Indonesia* 2, No. 4 (2024).

Sulistiyono, Budi, d.k.k. "Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 3 (November 2014)

Valerian, Dion. "Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo de Roos, dan Iris Haenen," *Veritas et Justitia* 8, no. 2 (2022).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5253).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
KEBIJAKAN KRIMINALISASI PENGABAIAN PERINTAH TERTULIS OTORITAS JASA KEUANGAN
Megawaty Putri Limaria, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6849).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2022 tentang Perintah Tertulis bagi Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 10/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13/OJK).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49/OJK).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 52/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93/OJK).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Perintah Tertulis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111/OJK).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
KEBIJAKAN KRIMINALISASI PENGABAIAN PERINTAH TERTULIS OTORITAS JASA KEUANGAN
Megawaty Putri Limaria, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Putusan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 475/G/2023/PTUN.JKT.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 238/B/2024/PT.TUN.JKT.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/TUN/2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIX/2021.

Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, diakses melalui https://kbbi.kemdikbud.go.id

Otoritas Jasa Keuangan, *FAQPOJK 31 Tahun 2024 Perintah Tertulis*, diakses melalui https://www.ojk.go.id.

Otoritas Jasa Keuangan. "RDKB November 2025: Sektor Jasa Keuangan yang Stabil Mendukung Perekonomian Nasional." Siaran Pers, 10 Desember 2025. Diakses 13 Januari 2026. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-November-2025.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. "Siaran Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) November 2025: Sektor Jasa Keuangan yang Stabil Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Optimal dan Berkelanjutan." Jakarta: OJK, 10 Desember 2025 (SP 221/GKPB/OJK/XI/2025). Diakses 13 Januari 2026. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-November-2025.aspx

Kementerian Hukum, *Reformasi Hukum Indonesia Melalui Tiga Aturan Hukum Pidana yang Baru*, diakses melalui https://kemenkum.go.id.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Narasumber Mufli Asmawidjaja, selaku Kepala Departemen Hukum pada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang dilakukan pada tanggal 17 November 2025.

Hasil wawancara dengan Narasumber Yuliana, selaku Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan pada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang dilakukan pada tanggal 21 November 2025.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
KEBIJAKAN KRIMINALISASI PENGABAIAN PERINTAH TERTULIS OTORITAS JASA KEUANGAN
Megawaty Putri Limaria, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Hasil wawancara dengan Narasumber Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. selaku Guru Besar Bidang Ilmu Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dilakukan pada tanggal 27 November 2025 melalui sarana telekomunikasi.

Hasil wawancara dengan Narasumber Dr. Albertina Ho, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 2025.